

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kualitas pelayanan PPKD Jakarta Selatan dalam menanggulangi pengangguran struktural, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelayanan yang diberikan telah berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat melalui lima dimensi *SERVQUAL*, yaitu *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *empathy*. PPKD Jakarta Selatan telah memiliki fasilitas pelatihan yang mendukung kebutuhan industri, mampu menjaga konsistensi pelaksanaan pelatihan di tengah efisiensi anggaran, menyediakan mekanisme pelayanan dan pengaduan yang responsif, didukung oleh instruktur berpengalaman serta sertifikasi BNSP, dan memberikan pelayanan yang relatif setara kepada seluruh peserta tanpa membedakan latar belakang.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Kualitas fasilitas dan pembaruan materi belum sepenuhnya merata antar-kejuruan, terutama pada bidang berbasis teknologi yang membutuhkan penyesuaian lebih cepat terhadap perkembangan industri. Selain itu, penyebaran informasi program melalui kanal resmi masih perlu diperluas agar mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas, khususnya kelompok pencari kerja yang belum memiliki akses informasi yang kuat. Dilihat dari efektivitas pelatihan menggunakan model Kirkpatrick, PPKD Jakarta Selatan menunjukkan hasil positif pada tingkat *reaction*, *learning*, dan *behavior*. Peserta memiliki tingkat kepuasan tinggi, memperoleh peningkatan keterampilan, serta mengalami perubahan perilaku terutama dalam aspek kedisiplinan dan kepercayaan diri.

Hal tersebut didukung oleh proses seleksi, pembinaan, serta sistem kedisiplinan yang diterapkan selama pelatihan. Namun, pada tingkat *results*, penyerapan kerja belum sepenuhnya merata karena keberhasilan lulusan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pelatihan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dan kondisi masing-masing individu. Hasil penelitian

terhadap alumni yang belum bekerja menunjukkan bahwa hambatan penyerapan lulusan berasal dari beberapa faktor, yaitu belum meratanya relevansi kompetensi antar-kejuruan, keterbatasan pengalaman kerja dan portofolio, persyaratan perusahaan yang masih menekankan pengalaman maupun latar belakang pendidikan, serta perbedaan bentuk dukungan pasca pelatihan yang diterima oleh alumni. Selain itu, status belum bekerja juga tidak selalu menunjukkan kegagalan program, karena terdapat alumni yang masih menyelesaikan pendidikan maupun alumni yang masih menghadapi hambatan dalam proses pencarian kerja.

Secara keseluruhan, PPKD Jakarta Selatan telah berperan dalam menanggulangi pengangguran struktural melalui pelayanan dan pelatihan kerja yang berkualitas. Namun, optimalisasi penyerapan lulusan masih membutuhkan penguatan hubungan antara kompetensi yang diberikan dengan kebutuhan pasar kerja melalui pembaruan kurikulum, peningkatan pengalaman kerja, perluasan kemitraan industri, serta pendampingan pasca lulus yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing alumni. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang lulus dan memperoleh sertifikat kompetensi, tetapi juga dari kemampuan lulusan untuk benar-benar memasuki pasar kerja.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. PPKD Jakarta Selatan perlu melakukan pembaruan kebutuhan pelatihan secara berkala pada setiap kejuruan. Pembaruan tersebut dapat dilakukan melalui *Training Needs Analysis* dengan melibatkan perusahaan mitra agar materi, perangkat, dan *tools* yang digunakan dalam pelatihan tetap sesuai dengan perkembangan kebutuhan industri. Perhatian khusus perlu diberikan kepada kejuruan berbasis teknologi karena perubahan perangkat dan standar kompetensinya berlangsung lebih cepat dibandingkan beberapa kejuruan lainnya.

2. PPKD Jakarta Selatan perlu memperluas kegiatan berbasis pengalaman nyata bagi peserta dan alumni. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui program magang singkat, pengerjaan proyek bersama perusahaan, *project-based assignment*, maupun kegiatan lain yang menghasilkan portofolio. Hal ini diperlukan agar lulusan tidak hanya memiliki sertifikat kompetensi, tetapi juga memiliki bukti pengalaman yang dapat digunakan pada saat melamar pekerjaan.
3. PPKD Jakarta Selatan perlu memperluas dan meratakan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri pada seluruh kejuruan. Kemitraan tidak hanya diarahkan pada penyediaan fasilitas atau penyusunan materi pelatihan, tetapi juga pada pembukaan jalur magang, rekrutmen langsung, maupun seleksi khusus bagi lulusan. Dengan demikian, manfaat kerja sama dengan industri tidak hanya dirasakan oleh kejuruan tertentu.
4. PPKD Jakarta Selatan perlu mengoptimalkan dukungan pasca pelatihan berdasarkan kondisi masing-masing alumni. Pemanfaatan SILATIFE dapat dikembangkan untuk mengelompokkan alumni yang belum bekerja berdasarkan hambatan yang mereka hadapi, misalnya kekurangan portofolio, membutuhkan pembaruan keterampilan, aktif mencari kerja namun belum lolos seleksi, atau belum aktif mencari pekerjaan karena masih menyelesaikan pendidikan. Dengan cara tersebut, tindak lanjut yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.
5. PPKD Jakarta Selatan perlu memperkuat layanan pemasaran lulusan agar tidak hanya berfokus pada penyebaran informasi lowongan kerja. Pendampingan dapat diperluas melalui kegiatan persiapan wawancara kerja, penyusunan CV dan portofolio, simulasi seleksi kerja, serta penyelenggaraan kegiatan rekrutmen yang mempertemukan alumni secara langsung dengan perusahaan sesuai dengan kejuruannya.
6. PPKD Jakarta Selatan perlu mempertahankan kualitas instruktur, fasilitas praktik, sertifikasi BNSP, serta pembentukan disiplin peserta yang selama ini telah berjalan dengan baik. Aspek-aspek tersebut

merupakan kekuatan PPKD Jakarta Selatan dan perlu terus dijaga agar kualitas pelatihan tidak mengalami penurunan, terutama di tengah adanya keterbatasan anggaran.

7. PPKD Jakarta Selatan perlu memperluas penyebaran informasi mengenai program pelatihan melalui kanal resmi maupun jaringan masyarakat. Penggunaan media sosial resmi dapat dikombinasikan dengan penyebaran informasi melalui kelurahan, kecamatan, RT/RW, komunitas pencari kerja, serta kanal digital lainnya agar informasi pelatihan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas dan tidak hanya bergantung pada jaringan informal tertentu.
8. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta perlu mendukung penguatan kapasitas PPKD Jakarta Selatan terutama dalam pembaruan sarana, pengembangan kejuruan, dan perluasan kemitraan industri. Dukungan tersebut diperlukan agar kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak terlalu besar terhadap jumlah masyarakat yang dapat mengikuti pelatihan, mengingat pengurangan jumlah angkatan secara langsung membatasi daya jangkau program terhadap pencari kerja.
9. Alumni PPKD Jakarta Selatan diharapkan tetap aktif meningkatkan kompetensi setelah menyelesaikan pelatihan. Sertifikasi dan keterampilan yang diperoleh dari PPKD perlu dilanjutkan dengan pengembangan portofolio, pencarian pengalaman, pembangunan jejaring profesional, serta pembaruan kemampuan sesuai perkembangan kebutuhan industri agar peluang memperoleh pekerjaan semakin besar.